

HADAPI TANTANGAN PERANG GENERASI KEENAM
AAU Dituntut Beradaptasi dan Antisipatif



KR-Saifullah Nur Ichwan

Gubernur AAU menyerahkan kenang-kenangan kepada narasumber.

SLEMAN (KR) - AAU dituntut untuk mampu beradaptasi serta mengambil langkah antisipatif dalam upaya mitigasi terhadap ancaman perang generasi keenam. Mengingat perang generasi keenam tidak hanya mengandalkan teknologi canggih dalam persenjataan, namun juga dikolaborasikan dengan penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi.

Gubernur AAU Marsda TNI Dr Ir Purwoko Aji Prabowo MM MDS saat membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo SE

MPP CSFA mengatakan, memasuki abad ke-20, terjadi pergeseran pendekatan perang, dimana peran 'non state actor' mulai mendominasi dengan menggunakan pendekatan non konvensional.

Perkembangan teknologi drone, cyber, senjata presisi tinggi, serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligent) menjadi bagian penting dan dianggap sebagai 'game changer' dalam strategi perang modern.

"Perang generasi keenam sebagai bagian dari perang modern. Tidak hanya mengandalkan tekno-

logi canggih dalam persenjataan, namun juga dikolaborasikan dengan penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi untuk menciptakan propaganda dan manipulasi opini publik dalam mendukung perang asimetris," katanya dalam acara Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia ke-5 Akademi Angkatan Udara (AAU), Rabu (22/11).

Acara tersebut juga menghadirkan Rektor Universitas Sebelah Maret Prof Dr Jamal Wiwoho SH MHum, Wakil Dekan II Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Marsma TNI Dr Ir Rudy AG Gultom MSc CEH CIQaR dan Kadiskomleka Marsma TNI Dr Penny Radjendra ST MSc.

Wakil Gubernur AAU Masekal Pertama Hendro Arief Herianto menambahkan, kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman yang dapat memicu perang menggunakan teknologi terkini. **(Sni)-f**

Tanamkan Nilai Seni Budaya Melalui Wayang Kulit

SLEMAN (KR) - SMPN 3 Sleman bekerja sama Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Sleman didukung dana keistimewaan (danais) mengadakan pertunjukan wayang kulit di sekolah setempat, Selasa (21/11). Pertunjukan wayang kulit menampilkan dalang cilik siswa kelas 8 SMPN 3 Sleman yaitu Syarif Maulana Ramadhana dan sinden cilik siswa kelas 7 Zalma Halum Attaya.

Kepala SMPN 3 Sleman Aris Susila Pambudi MPd mengatakan, pertunjukan wayang kulit di sekolah tujuannya untuk memfasilitasi bakat peserta didik yang luar biasa. Sekolah punya kelompok ekstrakurikuler karawitan, punya dalang cilik dan sinden cilik oleh siswa. "Jadi kalau mau mengadakan pertunjukan wayang kulit kami siap semuanya," terangnya.

Dikatakan Aris, sekolah



KR-Devid Permana

Pertunjukan wayang kulit oleh siswa SMPN 3 Sleman.

punya visi terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi budaya tersebut, maka digelar kegiatan-kegiatan berbasis budaya untuk aktualisasi siswa. Sebelum pertunjukan wayang dimulai, ditampilkan tari-tarian dan mendongeng berbahasa Jawa oleh siswa. "Kegiatan ini untuk mena-

namkan nilai seni dan budaya kepada siswa melalui pertunjukan wayang kulit," ujarnya.

Di samping pertunjukan wayang kulit, sekolah juga mengadakan Panen Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pnen karya P5 tidak menampilkan produk, melainkan tahapan-tahapan proses, mulai dari proses pengenalan, peta konsep, penelitian di lapangan. **(Dev)-f**

MASIH ADA YANG BELUM MILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pemkab Beri Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Anak

SLEMAN (KR) - Di Kabupaten Sleman masih ada anak-anak yang belum memiliki dokumen kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan per-31 Oktober 2023. Selain itu, masih terdapat data anak PAUD yang tercatat dalam aplikasi Dapodik belum sesuai data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

"Salah satu upaya menyelesaikan permasalahan data dokumen kependudukan anak ini yaitu dengan koordinasi terpadu dan efektif antara pengelola PAUD dan tenaga pendidik PAUD dengan Disdukcapil Sleman untuk melayani peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman Susmiarto, Selasa (22/11), terkait workshop dokumen kependudukan pada siswa PAUD.

Workshop diikuti perwakilan Lembaga PAUD dan Lembaga PAUD

non-formal dengan tujuan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan anak di Sleman. Sehingga seluruh anak di PAUD tercatat dalam biodata kependudukan, khususnya akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan tercantum pada Kartu Keluarga (KK).

Terkait itu, Bupati Sleman Kustini menilai pentingnya pencatatan data anak. Mengingat, tidak tercatatnya identitas seorang anak menyebabkan risiko eksploitasi terhadap anak tersebut semakin tinggi.

"Kami juga meminta masyarakat

agar menyadari betapa pentingnya pencatatan dokumen, tidak hanya KTP dan KK saja, tetapi juga pencatatan dokumen kependudukan anak," jelasnya.

Ditambahkan, dokumen kependudukan anak ini pada hakikatnya merupakan upaya Pemkab Sleman dalam memenuhi salah satu dari hak anak di Sleman. "Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Konvensi PBB 1989 mengenai Hak-hak Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memiliki atas suatu nama, memperoleh kewarganegaraan serta hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak anak tersebut dalam bentuk pemberian pelayanan yang komprehensif, termasuk kepemilikan dokumen kependudukan," tegas Bupati. **(Has)-f**

BUSINESS MATCHING P3DN,
Ajak Gunakan Produk Dalam Negeri

SLEMAN (KR) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY menggelar kegiatan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Transmart Yogyakarta Maguwaharjo Depok Sleman. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan belanja daerah Pemda DIY untuk produk dalam negeri, mempromosikan produk IKM, dan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaku industri dalam negeri dalam memproduksi barang dan jasa.

"Saya sangat mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan ini karena merupakan bentuk rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Selain itu, kita diwajibkan menggunakan



KR- Roby AS

Sekda DIY dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkeliling stan.

produk dalam negeri dan selalu bangga menggunakan produk dalam negeri terutama produk dari Yogyakarta, karena jika kita bangga menggunakan produk Yogyakarta secara otomatis kita bangga menggunakan produk In-

donesia," ungkap Sekda DIY Beny Suharsono, Selasa (22/11).

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Syam Arjayanti mengungkapkan, acara ini diikuti 20 perusahaan penyedia barang dan jasa

yang terdiri dari industri makanan minuman, industri sandang, alat tepat guna, industri mesin dan rlektronika, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya seperti event organizer, serta OPD baik Provinsi maupun Kabupaten Kota serta BUMD.

"Acara ini menampilkan berbagai display produk dalam negeri dan pada acara tersebut juga dilakukan talkshow peningkatan wawasan P3DN serta disediakan layanan bagaimana IKM bisa mendapatkan sertifikat TKDN melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta layanan pendampingan OPD dalam meningkat- kan belanja Produk dalam Negeri," jelasnya. **(*-1)-f**

MULAI BERLAKU JANUARI 2024

Pembayaran Pajak dan Retribusi Paling Lambat Tanggal 10

SLEMAN (KR) - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kepada wajib pajak restoran. Rencananya tahun 2024, untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat tanggal 10.

Sekretaris BKAD Kabupaten Sleman Elli Widiastuti SE AKt mengatakan, dengan adanya UU. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, nanti akan ada peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana perda tersebut akan menggantikan perda yang lama.

"Kalau perda yang lama, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, PBB sendiri-sendiri. Tapi besok akan jadi satu. Sekarang ini Perda sudah ditetapkan dan tinggal menunggu evaluasi Gubernur," kata Elli saat sosialisasi kepada wajib pa-



KR-Saifullah Nur Ichwan

Elli saat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran tentang perda pajak daerah dan retribusi daerah.

jak restoran, Rabu (22/11) di Kantor BKAD.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik. Hal itu sebagai upaya menjalin komunikasi antara instansi penyelenggara layanan dengan wajib pajak. Selain wajib pajak restoran, BKAD juga melakukan sosialisai dengan kelompok wajib pajak hotel,

parkir dan hiburan.

Lebih lanjut dikatakan Elli, Perda tersebut akan berlaku pada 4 Januari 2024 mendatang. Dalam perda tersebut akan ada beberapa perubahan terkait kewajiban pajak. Perubahan diantaranya 'self assessment' atau penghitungan pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, dibayarkan paling lambat tiap tanggal 10.

"Kalau tahun ini pem-

bayaran pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat tanggal 20. Tapi mulai tahun depan, paling lambat tanggal 10. Jika melebihi tanggal 10, akan dikenakan denda 1 persen dari nilai pajak," terang Elli.

Elli meminta kepada wajib pajak dalam penghitungan pajak atau 'self assessment' disesuaikan dengan nilai omzet. Jika tidak sesuai dengan kondisi riil, nanti dapat terkena sanksi. "Kamiimbau penghitungan pajak harus disesuaikan dengan omzet yang riil. Tidak boleh ada rekayasa," imbaunya.

Menurut Elli, pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak dikelola dalam APBD Kabupaten Sleman. Selanjutnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman. "Jadi pajak dari wajib pajak itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya untuk membangun jalan, jembatan maupun pembangunan infrastruktur lainnya," pungkas Elli. **(Sni)-f**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Perwakilan wajib pajak menandatangani berita acara forum konsultasi publik.

Penciptaan dan Penerapan Inovasi

PEMKAB Sleman sudah mempunyai kebijakan yang mapan mengenai pengembangan inovasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perbup Sleman nomor 30 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah desa, dan kesejahteraan masyarakat.

Arah inovasi daerah di Kabupaten Sleman meliputi: (1) peningkatan pelayanan publik, (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan (3) peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip yang dipedomani dalam penyelenggaraan inovasi daerah mencakup peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas layanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggung-jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sesuai ketentuan yang berlaku, diharapkan agar bentuk inovasi daerah selaras dengan salah satu bidang, yaitu: (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa; (b) inovasi pelayanan publik; atau (c) inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasar hal-hal tersebut, Pemkab Sleman selalu menyambut baik adanya inovasi. Pemkab Sleman siap menerima dan mengaplikasikan inovasi dari berbagai pihak. Pada saat yang sama Pemkab Sleman juga mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sleman untuk terus menciptakan dan menerapkan inovasi.

Terbukti mereka telah lama mengembangkan dan menerapkan banyak inovasi. Salah satunya adalah pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan data kemiskinan yang telah

Danang Maharsa SE

dibuat pada tahun 2011. Saat itu belum ada kabupaten/kota lain yang melakukan, Sleman sering dijadikan rujukan dan dikunjungi untuk studi banding. Pengelolaan data kemiskinan berbasis teknologi informasi itu sampai sekarang terus dipertahankan dan dikembangkan.

Contoh lainnya adalah inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sleman sejak beberapa tahun ini menerapkan layanan dokumen kependudukan secara online. Warga yang ingin mendapatkan ataupun memperbaharui data KTP, KK, akte kelahiran dll, proses permohonannya bisa dilakukan dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Mereka datang hanya ketika mengambil dokumen tersebut.

Inovasi lainnya lagi berupa penyediaan bantuan teknologi untuk industri mikro dan kecil. Layanan disediakan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendesain kemasan, membuat foto produk, mendesain promosi, dan lain-lain. Layanan tersebut disediakan di Rumah Kreatif Sleman (RKS) yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rumah kreatif tersebut tergolong berhasil dalam membina para pengusaha mikro-kecil. Oleh karena itu banyak dikunjungi Lembaga-lembaga dari luar Sleman.

Pemkab Sleman juga secara rutin setiap tahun menyediakan dana hibah penelitian melalui mekanisme kompetisi. Dari situ terlahir sejumlah inovasi terapan yang berguna bagi masyarakat. Dengan kebijakan dan bukti implementasi itu saya hendak menyampaikan bahwa Pemkab Sleman selalu siap menyambut dan memanfaatkan inovasi-inovasi baru. Melalui tulisan ini saya berharap pemuda-pemudi Sleman dan pemuda-pemudi seluruh pelosok nusantara yang sedang studi di wilayah Sleman terus berinovasi. Berikan karya terbaik kalian untuk daerah masing-masing serta untuk kemajuan bangsa dan negara. □ -f